

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap orang tinggal di Negara Indonesia harus tunduk dan taat terhadap segala bentuk hukum yang telah diatur oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai negara hukum seharusnya negara melindungi setiap masyarakatnya dari segala jenis ancaman ataupun tindakan kejahatan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 Bab XII mengenai Pertahanan Negara dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat (4) menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Masyarakat Indonesia sekarang ini dihadapkan pada kehidupan yang sangat memprihatinkan karena semakin meluasnya peredaran narkoba di seluruh Wilayah Indonesia . Adapun permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sekarang ini sudah membuat kalangan masyarakat resah dan tidak nyaman disebabkan sangat cepat dan mudahnya narkoba masuk ke wilayah Indonesia khususnya di Yogyakarta. Yogyakarta menjadi salah satu target pasar narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba). Saat ini Yogyakarta bukan lagi sebagai daerah transit jalur distribusi narkoba, tapi sudah menjadi pasar

potensi dan lahan distribusi narkoba dari jaringan internasional.¹ Tercatat pada tahun 2016 DIY menduduki peringkat ke-1 pengguna narkoba di Indonesia atau sebesar 93.600 dengan segmen pengguna narkoba terdiri dari pelajar dan mahasiswa. Sementara pengedar narkoba adalah residivis yang mendekam di LP (Lembaga Pemasyarakatan).²

Narkotika sudah menjalar ke segala usia terutama bagi remaja. Narkotika tidak mudah terlepas dari kalangan remaja seperti sudah menjadi suatu kebutuhan, sudah dianggap wajar dan biasa saja. Pecandu narkotika pada umumnya berusia antara 15 sampai 24 tahun, artinya usia tersebut ialah usia produktif atau usia pelajar.

Banyak faktor yang mempengaruhi kenakalan pelajar saat ini, seperti faktor pendidikan, lingkungan pergaulan, keluarga, maupun faktor perkembangan jaman yang ada. Dalam keluarga, orang tua harus bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya serta hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Keperluan anak secara jasmani dipenuhi pula sebagaimana layaknya, sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.³ Faktor keluarga sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak, didikan orang tua yang akan membentuk anak itu akan

¹ Yuniar H, 2015, "*BNN DIY: Yogyakarta Jadi Pasar Jaringan Narkoba Internasional*", <http://news.liputan6.com/read/2355544/bnn-diy-yogyakarta-jadi-pasar-jaringan-narkoba-internasional>, Diakses pada tanggal 31 Oktober 2017 pukul 21.00 Wib.

² Usman Hadi, 2017, *Awat! Yogyakarta Urutan Pertama Pengguna Narkoba Terbanyak*. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3550865/awat-yogyakarta-urutan-pertama-pengguna-narkoba-terbanyak>, diakses 31 Oktober 2017 pukul 21.30 Wib.

³ Wagiaty Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.22.

menjadi seperti apa nantinya di masa depan, karena semua itu dimulai dari keluarga.

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini.

Pemakaian narkotika diizinkan oleh negara untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk kebutuhan medis apabila narkotika digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan Dokter Anastesi, maka narkotika dapat bermanfaat untuk kepentingan pengobatan sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia.

Narkotika sangatlah berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan ketagihan, dan ketergantungan. Dari ketergantungan inilah bahaya narkoba akan mempengaruhi fisik, psikologis, maupun lingkungan sosial. Kebanyakan pecandu tidak dapat menghentikan konsumsi narkotika karena narkotika membuat efek ketergantungan kepada pemakainya. Beberapa jenis golongan narkotika yang sangat berbahaya antara lain heroin, sabu-sabu, *ectasy*, *cocain*, ganja dan *opioid*.

Berdasarkan fakta yang ada, aparat penegak hukum hanya dapat menjerat pelaku yang dalam hal ini adalah kurir-kurir kecil yang juga merupakan korban dikarenakan kendala perekonomian melakukan hal tersebut, akan tetapi tidak mampu untuk menjebloskan “Bos Besar” yakni bandar narkoba yang mengendalikan dan membiayai aksi kejahatan besar ini. Selain itu, kurangnya pengamanan terhadap residivis di Lembaga Pemasyarakatan sehingga mereka dapat leluasa untuk mengedarkan narkoba baik di luar maupun di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal inilah yang mengakibatkan semakin meningkatnya kejahatan ini.

Peran serta dari aparat pemerintah mulai dari Kepolisian Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun seluruh masyarakat Indonesia sangatlah diharapkan untuk memerangi dan memberantas peredaran narkoba yang ada di wilayah Indonesia sebab peredaran narkoba di Wilayah Indonesia merupakan suatu kejahatan yang harus segera dicegah bahkan diberantas dari wilayah Indonesia .

Pada tahun 2014, Satresnarkoba Polres Sleman mengungkap 50 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 70 orang tersangka. Kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan pengungkapan kasus narkoba, yakni 54 kasus dengan 83 tersangka. Lalu 2016 hingga bulan Agustus ini, ada 41 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 63 tersangka yang terungkap. Saat ini pengungkapan masih terus berjalan, kita belum tahu bisa saja tahun ini ada kenaikan, ujar AKP Rony Are Setia, Kasat Resnarkoba Polres Sleman, Dari 41 pengungkapan kasus narkoba di 2016, penyalahgunaan sabu paling

mendonasi. 26 kasus merupakan penyalahgunaan sabu, sembilan kasus Psikotropika golongan IV, tiga kasus salahguna ganja, satu kasus putaw, satu kasus ekstasi, dan satu kasus jamur mashroom. Penyalahgunaan narkoba itu didominasi oleh tersangka dengan kisaran usia produktif. Untuk rentangan usia yang menempati urutan pertama penyalahgunaan narkoba yakni usia 30 tahun ke atas.⁴

Dari beberapa fakta tersebut, timbul pertanyaan mengapa penyalahgunaan narkoba selalu meningkat khususnya di Kabupaten Sleman. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan membahas lebih mendalam dalam usulan penelitian yang berjudul **“UPAYA KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SLEMAN DALAM PROSES PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KABUPATEN SLEMAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang sudah dipaparkan maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Resor Sleman dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman?

⁴ Jihad Akbar, *Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Sleman Di Dominasi Tersangka Usia Produktif*, <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/19/kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-sleman-didominasi-tersangka-usia-produktif>, Diakses 1 November 2017 pukul 3.00 Wib.

2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Sleman dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Upaya Kepolisian Resor Sleman dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman.
2. Kendala dan hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Sleman dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan sumbangan pemikiran tentang aturan narkoba dan kepolisian pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Bagi masyarakat

Sebagai pengetahuan agar masyarakat lebih mengerti dan memahami mengenai bagaimana kinerja dan langkah - langkah pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba serta hambatan – hambatannya.

b. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai referensi dan informasi bagi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman Yogyakarta.

c. Bagi perumus peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dan saran terhadap perumusan peraturan perundang-undangan untuk mengatur mengenai tindakan-tindakan yang perlu dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menciptakan kepastian hukum tepatnya dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba khususnya di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta.

d. Kepolisian Polresta Sleman

Memberi sumbangan pemikiran kepada aparat Kepolisian Polresta Sleman dalam menindak dan melakukan pencegahan serta pemberantasan narkoba untuk mengurangi peredaran dan korban penyalahgunaan narkoba di Sleman Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian ini benar-benar hasil karya penulis sendiri maka penulis menyertakan beberapa penulisan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Berikut adalah penulisan skripsi yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat:

1. Nama Penulis : Fram Raditya Yunanda Gintings
- NPM : 090510174
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Judul Penelitian : Peran Kepolisian Serta Upaya Masyarakat Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
- Rumusan Masalah :

- a. Upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat DIY untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika?
- b. Apa yang menjadi kendala kepolisian dan masyarakat DIY dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika?

Hasil penelitian : Upaya yang dilakukan oleh kepolisian dan masyarakat untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika adalah :

- 1) Upaya yang dilakukan oleh POLDA DIY yaitu :
 - a. Upaya pre-emptif yaitu, dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, melakukan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan

dan penyebaran pamflet, poster, ataupun spanduk di setiap daerah.

- b. Upaya preventif dengan melakukan patroli dari personil kepolisian, melakukan razia di tempat – tempat rawan terjadi peredaran narkoba.
- c. Upaya represif meliputi penangkapan dan penggeledahan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, melakukan investigasi serta penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk menetapkan para pelakunya sebagai tersangka.

2) Upaya yang dilakukan oleh masyarakat yaitu :

- a. Upaya pre-emptif, masyarakat melakukan pembinaan dan penyuluhan bersama instansi terkait, menumbuhkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba dimulai dari pendidikan sejak dini oleh orang tua dalam keluarga.
- b. Upaya preventif masyarakat dengan melakukan mencari, memperoleh, dan memberikan informasi kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional jika ada dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Upaya represif, masyarakat membangun kerjasama dengan kepolisian atau BNN dalam upaya pencegahan peredaran gelap

narkotika, melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

3) Kendala yang dihadapi POLDA DIY dan masyarakat dalam menanggulangi peredaran narkotika adalah :

- a. POLDA DIY mengalami kekurangan jumlah anggota, kurangnya kualitas SDM sehingga tidak efektif dalam mengungkapkan dan menangkap para pengedar narkotika yang berada di DIY. Ada kebocoran informasi mengenai kapan dan dimana razia akan dilakukan. Sarana yang kurang memadai dan kurangnya dana yang minim menyebabkan upaya penanggulangan peredaran gelap narkotika tidak maksimal.
- b. Masyarakat khususnya DIY kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku peredaran gelap narkotika yang semakin hari semakin sulit diminimalisir. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ciri – ciri narkotika dan kurangnya kesadaran akan kejahatan narkotika yang terjadi di lingkungannya.

2. Nama Penulis : David Brain Kasidy Marpaung

NPM : 070509759

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Judul Penelitian : Polri dalam memberantas tindak pidana narkotika di Provinsi DIY

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana implementasi kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi DIY?
- 2) Apa kendala kepolisian negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi DIY?

Hasil penelitian : Cara Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi DIY ada 2 sisi:

1. Upaya Polda DIY pada praktek lapangan dan upaya Polda DIY dalam keseluruhan; Kendala Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba di Provinsi DIY ialah kurangnya jumlah dan prasarana serta kurangnya kesadaran masyarakat atau takut dalam melapor adanya tindak pidana narkoba kepada Ditresnarkoba Polda DIY.
 2. Upaya represif, masyarakat membangun kerjasama dengan kepolisian atau BNN dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba, melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. Nama Penulis : Giovanni Habary
- NPM : 120510805
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Judul Penelitian : Upaya Kepolisian Polda DIY Dalam Memberantas Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah upaya Kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Apa kendala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Hasil penelitian :

- 1) Kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu polisi sudah melakukan tugas mereka seperti yang sudah di atur dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu tugas pokok Kepolisian adalah :
 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 2. Menegakkan hukum
 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Kendala kepolisian Polda DIY dalam memberantas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta yaitu :
 1. Kurang jumlah personil kepolisian di Polda DIY Kurangnya personil mengakibatkan kinerja kepolisian untuk bisa

memberantas tindak pidana narkoba menjadi tidak efektif. Karena sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kasus yang terjadi maka hingga saat ini masih banyak kasus tindak pidana narkoba yang belum terungkap dan terselesaikan.

2. Informasi teknologi

Peralatan teknologi yang tidak memadai dan juga kurangnya pengetahuan mengenai teknologi yang personil kepolisian miliki menjadi salah satu kendala dalam membongkar tindak pidana narkoba. Sehingga pemberantasan kasus tindak pidana narkoba menjadi lamban dan sulit untuk diungkap.

3. Masyarakat

Masyarakat yang kurang peduli dengan keadaan sekitar mengakibatkan laporan yang masuk ke kepolisian pun menjadi sangat sedikit, sehingga polisi harus turun tangan langsung ke lapangan untuk mencari informasi mengenai tindak pidana narkoba.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, dengan judul “Upaya Kepolisian Resor Sleman Dalam Proses Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba di Kabupaten Sleman”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut:

1. Upaya

Usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).

2. Kepolisian

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1) “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan: usaha pencegahan kemusnahan bahasa daerah sedang diseminarkan; sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.

4. Pemberantasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberantasan adalah (1) proses, cara, perbuatan memberantas: pemerintah meningkatkan pemberantasan kaum penyeludup; diadakan kursus pemberantasan buta huruf agar rakyat dapat membaca dan menulis; (2) pencegahan, pengucilan perkembangan, atau pemusnahan penyakit.

5. Tindak pidana

Menurut Prof. Moelyatno S.H tindak pidana/perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

6. Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat berbahaya yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

7. Sleman

Sleman adalah sebuah kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian hukum Normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Resor Sleman Dalam Proses Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain :

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum yang diambil dari buku – buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi maupun seminar, hasil penelitian, website maupun surat kabar yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai upaya Kepolisian Resor Sleman dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, surat kabar dan internet.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber yaitu dengan Iptu Joko Budiono, S.H., KBO (Kaur Bin Opsnal), Ani Sulistyarini, S.Kom.M.H.L.i., selaku Kasat Binmas dan Ipda Sapto zane, S.H.,

penyidik ops Satresnarkoba Polres Sleman, sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dan terbuka.

4. Metode Analisis Data

a. Analisis bahan hukum primer

Sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum Normatif/dogmatif yaitu akan dilakukan:

1) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Sleman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Adanya antinomi antara Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan fakta sosial.

3) Analisis Hukum Positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki dan dikaji.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa

sehari-hari/hukum, sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan, dan teleologis adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam hal ini menilai upaya kepolisian dalam kaitannya dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman.

b. Analisis Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat hukum akan dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Undang-undang narkoba dan Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia, dan yang khusus adalah hasil penelitian mengenai upaya Kepolisian Resor Sleman dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Kabupaten Sleman.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum mengenai materi yang penulis teliti secara ringkas dapat diuraikan dari Bab I sampai Bab III sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika isi yang digunakan dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Pembahasan ini berisi Pengertian Umum Kepolisian Republik Indonesia, Tindak Pidana Narkotika dan hasil penelitian mengenai Upaya Kepolisian Resor Sleman Dalam Proses Pencegahan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Sleman.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum tentang Sistem Peradilan Pidana.